

2 Orang Tewas Kecelakaan Lalin

WONOSARI (KR) - Dua orang pejalan kaki dan pengendara motor tewas kecelakaan lalulintas di Kabupaten Gunungkidul. Kejadian pertama menimpa seorang pengendara motor Suharto (71) warga Sumberejo, Ngawu, Kapanewon Playen, pengendara Honda Nopol AB 4043 VW dengan lokasi kejadian di Jl Wonosari-Yogya tepatnya di ruas jalan Gading, Playen. Kedua menimpa pejalan kaki Ny Wakinem (70) warga Padukuhan Tanggung, Girimulyo, Panggang dengan lokasi kejadian di ruas jalan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) tepatnya di ruas jalan Saptosari - Panggang, Gunungkidul. "Kedua korban meninggal dunia di lokasi kejadian," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Gunungkidul Ipda Winarko Senin (28/4).

Informasi di masing-masing lokasi kejadian menyatakan, kecelakaan yang terjadi di JJLS Panggang melibatkan sepeda motor Honda GL Nopol AB 3703 EU yang dikendarai Irfan Faturohman (21) warga Mendak, Girisekar, Panggang dan pejalan kaki Ny Wakinem (70). Peristiwa itu bermula ketika sepeda motor yang dikendarai Irfan melaju dari arah Panggang menuju Saptosari dengan kecepatan sedang. Sampai di lokasi kejadian, tepatnya di jalan menikung ke kanan, korban mendadak menyeberang jalan dari kiri jalan ke kanan jalan. Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan tidak bisa dihindarkan.

"Akibat benturan keras korban mengalami luka berat dan tewas di lokasi kejadian," imbuhnya.

Sebelumnya kecelakaan lalin juga terjadi di Jl Yogya-Wonosari dengan korban pengendara motor Honda Nopol AB 4043 VW yang dikendarai Suharto (71) warga Sumberejo, Ngawu, Playen, Gunungkidul. Kecelakaan terjadi saat berusaha mendahului mobil di depannya, motor korban berserempetan dengan mobil Mitsubishi Nopol AB 7679 CD yang dikemudikan oleh Sukri warga Munggi. Kecelakaan bermula saat sepeda motor dan mobil melaju dari arah Yogyakarta menuju ke arah Wonosari. Sampai di lokasi kejadian, tepatnya pada jalan yang lurus kedua kendaraan sama-sama akan mendahului mobil secara bersamaan. Kedua kendaraan itu bersenggolan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pengendara motor terjatuh dan mengalami luka berat dan meninggal di lokasi kejadian. Kedua kecelakaan lalulintas tersebut kini sudah ditangani Satlantas Polres Gunungkidul. (Bmp)-d

Dua Wisatawan Asal Jakarta Tewas Tenggelam di Curug Pinang Baturraden

PURWOKERTO (KR) - Dua wisatawan asal Jakarta Barat meninggal dunia setelah tenggelam di Objek Wisata Curug Pinang, Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (27/4) sore.

Kedua korban adalah Imron Maulana (26), warga Jalan Kampung Sawah RT 010/007, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dan Maulana Ahmad (27), warga Kelurahan Kapuk RT 007/011, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Peristiwa nahas ini bermula saat kedua korban sedang berswafoto di tepi curug. Diduga kehilangan keseimbangan, keduanya terpeleset dan jatuh ke kubangan air dengan kedalaman sekitar tiga meter.

Plt Kapolsek Baturraden Iptu Mufid Bayu Aji, menjelaskan, kedua korban diduga tidak dapat berenang sehingga akhirnya tenggelam.

"Diduga, kedua korban tidak bisa berenang sehingga menyebabkan

mereka tenggelam dan meninggal dunia," kata Iptu Mufid.

Seorang teman korban yang selamat segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pengelola wisata. Dua petugas, dibantu warga yang berada di lokasi, langsung berupaya melakukan pertolongan.

Sayangnya, saat kedua korban berhasil diangkat ke daratan, mereka sudah dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Untuk memastikan penyebab kematian, tim Inafis Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas bersama dokter dari Puskesmas Baturraden II melakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kedua korban mumi meninggal



Dua korban yang sudah dievakuasi ke daratan.

KR-Driyanto

akibat tenggelam, tanpa ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan.

Menyikapi insiden ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama kepolisian merekomendasikan evaluasi

terhadap sistem keamanan dan pengawasan di seluruh objek wisata alam di wilayah tersebut. Langkah-langkah preventif dan mitigasi risiko dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. (Dri)-d

10 TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIAMANKAN

Disita Ratusan Psikotropika dan Ratusan Ribu Obaya



KR-Istimewa

Polresta rilis pengungkapan kasus narkoba dengan menghadirkan 10 tersangka.

YOGYA (KR) - Selama Periode 20 Maret 2025 sampai dengan 26 April 2025, Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan ungu

kasus narkoba sebanyak 10 kasus di 10 tersangka. Sebagai komitmen Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dalam rangka mendukung dan

menyusutkan Program Asta Cita Presiden RI

Sepuluh tersangka semuanya laki-laki dari berbagai latar belakang, sopir, teknisi hape, karyawan, swasta, tukang kebun, dan lainnya," ungkap Kasatresnarkoba Polresta Yogyakarta AKP Ardiansyah Rolindo Saputra, saat rilis Senin (28/4) di Mapolresta Yogyakarta.

Barang bukti yang diamankan berupa Psikotropika 261 butir, dan Obat Berbahaya (Obaya) 150.194 butir. "Dari barang bukti yang berhasil disita diperkirakan dapat menyelamatkan 150.455 anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba," tandasnya.

Sepuluh tersangka juga dihadirkan dalam rilis yaitu MAW (23), AA (32),

DEW (24), EA (32), TDZ (28), MH (28), WK (37), SA (26), AAR (24), RSH (23) diantaranya saling berkait.

"Jeratan pidana yang disanggakan tergantung perannya ada yang dikenakan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 436 ayat (2) juncto Pasal 145 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," paparnya.

Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp.5 M - 12 M. Kemudian Jeratan Pasal 111 atau Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 12 M. (Vin)-d

Unilateralisme

US\$59,35 juta. Negara Tujuan Ekspor Terbesar DIY adalah Amerika Serikat: 43,19%, Uni Eropa: 23,73%, ASEAN: 2,60%. Sektor industri pengolahan mendominasi ekspor DIY, menyumbang 99,06% dari total ekspor selama Januari hingga November 2024. Gambaran profil ekspor DIY tersebut menggambarkan ketergantungan terhadap pasar Amerika.

Era unilateralisme baru ini sekaligus menunjukkan tingkat risiko yang tinggi atas ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat. Secara historis, unilateralisme bukanlah fenomena baru. Amerika Serikat (AS) setelah Perang Dunia I, mengambil posisi unilateralis dengan menolak bergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa. AS saat itu lebih memilih melindungi kepentingan dalam negerinya dan enggan terlibat dalam urusan luar negeri secara kolektif. Namun, setelah Perang Dunia II, pendekatan ini mulai tergeser oleh multilateralisme, terutama dengan lahirnya lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang justru didorong oleh Amerika Serikat juga. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Dana Moneter Internasional (IMF). Multilateralisme mendorong kerja sama antarnegara dan mendorong stabilitas ekonomi global melalui aturan dan kesepakatan bersama.

Revisi

"Kita bicara mengenai indeks demokrasi yang selalu rendah. Kita mengalami penurunan indeks demokrasi dari *prominent* (menonjol) ke *fraud* (penipuan) demokrasi, karena salah satunya UU Ormas atau Perppu No 2 Tahun 2017 ini," katanya.

Oleh karena itu, Menteri HAM mendukung wacana revisi UU Ormas demi memajukan demokrasi tanah air. Bahkan, pendekatan pengaturan ini perlu ditanyakan.

"Revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu No 2 Tahun 2017," ucap Pigai. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri

Namun, memasuki abad ke-21, terjadi pergeseran menuju dunia multipolar, di mana kekuatan global tidak lagi terpusat pada satu negara seperti Amerika Serikat, melainkan tersebar ke berbagai pusat kekuatan seperti Tiongkok, Uni Eropa, dan India. Dalam konteks ini, unilateralisme menjadi semakin kontras dengan realitas lanskap geopolitik baru. Donald Trump, selama kampanye dan masa jabatannya kedua, mendorong kebijakan *iAmerica First* yang sangat kental dengan semangat unilateralisme. Salah satu kebijakan utamanya adalah penerapan tarif resiprokal, yakni pengenaan tarif setara terhadap negara yang menerapkan tarif tinggi terhadap produk AS.

Secara teori, kebijakan ini mengacu pada proteksionisme yang dijelaskan oleh Friedrich List (1841), yang menyatakan bahwa negara perlu melindungi industrinya dari persaingan luar negeri demi pembangunan jangka panjang. Dalam *The National System of Political Economy*, List menulis, *The power of producing wealth is infinitely more important than wealth itself*. Namun, pendekatan ini bertentangan dengan pandangan ekonomi klasik dari Adam Smith dan David Ricardo. Paul Krugman dalam *International Economics* (2018), juga mengingatkan bahwa proteksionisme bisa menyeb

(Mendagri) Muhammad Tito Kamavian membuka peluang merevisi UU Ormas sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan sejumlah ormas di Tanah Air. Tito mengatakan, revisi ini menjadi penting agar pengawasan terhadap ormas makin ketat dan akuntabel.

Mendagri menyebutkan, salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. "Ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat akar rumput," ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soepamo menilai, esensi wacana revisi UU No 17 Tahun

Sambungan hal 1

babkan "mutual losses", karena negara mitra akan melakukan tindakan balasan yang sama. Kita perlu segera mengambil momentum untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi total sebagai bagian dari reformasi struktural dan reformasi birokrasi yang pro dunia usaha tanpa mengesampingkan pembangunan kesejahteraan rakyat. Diversifikasi pasar ekspor ke kawasan Eropa Timur, Asia, Afrika, dan Timur Tengah menjadi penting agar tidak terlalu bergantung pada pasar Amerika atau Eropa. Michael Porter (1990) dalam *The Competitive Advantage of Nations* menekankan pentingnya inovasi dan keunggulan daya saing sebagai kunci untuk bertahan dalam kompetisi global. Dengan demikian, unilateralisme, meskipun sah sebagai pilihan kebijakan negara, berisiko besar dalam era multipolar yang menuntut kerja sama. DIY dan wilayah lain perlu membangun ketangguhan ekonomi yang agile dan adaptif terhadap dinamika global serta tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan sepihak negara-negara besar.

(Penulis, Pengurus Kadin DIY, Wakil Ketua Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia DIY, dan Perwakilan Unsur Pengusaha di Dewan Pengupahan DIY)-d

Sambungan hal 1

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yakni mempercepat proses likuidasi pembubaran ormas. "Esensi dari UU Ormas yang baru direvisi itu untuk mempercepat proses likuidasi pembubaran ormas," kata Eddy di kompleks parlemen Senayan, kemarin

Eddy menekankan, pemerintah mengantongi kewenangan untuk membubarkan ormas yang dinilai melanggar ketentuan umum di tengah masyarakat. Untuk itu, ia menyatakan dukungannya terhadap wacana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU Ormas sebagai respons pengawasan atas maraknya tindakan menyimpang oleh sejumlah ormas di tanah air. (Ant/Obi)-d

Sambungan hal 1

paling dominan yang ditangani TNI AL. Pelanggaran-pelanggaran itu, di antaranya terkait pelayaran, kehutanan, penyelundupan narkoba dan barang-barang terlarang, migas, keimigrasian, kepabeanaan dan pertambangan. "Hampir tiap minggu, kita berhasil menangkap penyelundupan, baik itu narkoba, baby lobster, gamen atau istilahnya ball press. Kemudian masalah keimigrasian, illegal migrant, terutama Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura," jelasnya.

Secara umum, Ali menjelaskan, pelanggaran yang berkaitan dengan pelayaran, kehutanan, kepabeanaan, cenderung mengalami penurunan. Sedangkan pelanggaran terkait perikanan, narkoba, migas, kepabeanaan dan pertambangan, menunjukkan tren peningkatan. Untuk pelanggaran soal perikanan dan pelayaran, TNI AL bertindak selaku penyidik. Namun, pelanggaran-pelanggaran kategori lainnya diilmpahkan ke penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lembaga lain yang berwenang. (Ant/Obi)-d

Sebanyak

asal Indonesia secara bertahap akan mulai diib-erangkatkan ke tanah suci dari embarkasi masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Hilman juga melaporkan mengenai perkembangan pemeriksaan kesehatan. Di hadapan para wakil rakyat yang membidangi, di antaranya bidang keagamaan itu, Hilman menyampaikan, terdapat 20.591 calon jemaah haji kategori pendamping yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 19.316 jemaah calon haji telah *istitha'ah* atau memenuhi syarat kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji.

Kejagung

"Penyidik sudah meminta pemblokiran kepada Kantor Badan Pertanahan di beberapa tempat. Ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Kota Depok, Jawa Barat, dan ada di Pekanbaru, Riau. Selain aset, penyidik juga menyita berbagai dokumen yang berkaitan dengan perkara dugaan TPPU ini," ungkapnya.

Harli juga mengatakan penetapan kasus ini untuk menggali lebih jauh asal gratifikasi uang Rp 915 miliar dan 51 kilogram emas yang diduga didapatkan Zafar Ricar selama menjabat sebagai pejabat MA. Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Zafar Ricar melakukan pemufakatan jahat berupa pembantuan

Tabrak

Pihak keluarga dan pengendara sudah sepakat menyelesaikan permasalahannya tersebut secara kekeluargaan dengan memberikan pernyataan terlampir. Keluarga korban juga menyampaikan terima kasih kepada

Sambungan hal 1

"Per 27 April 2025 pukul 20.00 WIB, jemaah haji reguler dengan kategori pendamping yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak 20.591 orang, di mana sebanyak 19.316 orang di antaranya lulus *istitha'ah*," ucapnya.

Sementara itu, Pemerintah Arab Saudi mengingatkan calhaj Indonesia untuk tidak menggunakan visa selain visa haji ketika datang ke Tanah Suci pada musim haji 2025. Hal itu diingatkan Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief, saat melepas keberangkatan petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, kemarin

Hilman mengatakan, Arab Saudi menyampaikan banyak

Sambungan hal 1

untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim berupa uang senilai Rp 5 miliar, serta menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp 915 miliar dan emas seberat 51 kilogram selama menjabat di MA untuk membantu pengurusan perkara pada tahun 2012-2022.

Atas perbuatannya, Zafar Ricar disanggakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 B juncto Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (Ant/Has)-d

Sambungan hal 1

da kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya dan Polsek Cikalong yang sudah memberikan pelayanan untuk menyelesaikan masalah tersebut. (Ant/Has)-d

KSAL

Dari Sispuskodal itu, ka Ali, pengawasan jarak jauh mencapai 50 persen dan pengawasan pesisir dan perairan teritorial sudah mencapai 30 persen. Namun, ia menyebutkan, pengawasan bawah laut masih 0 persen. Dalam pengembangan Sispuskodal, katanya, TNI AL masih bekerja sama dengan negara Singapura yang memiliki kecanggihannya. Negara tersebut memiliki Information Fusion Center (IFC) yang paling modern. "Kita menempatkan ILO (international liaison officer) di sana, untuk ikut mengamati dan memberikan data-data apabila ada anomali kegiatan ilegal di kawasan," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati mengaku khawatir dengan fakta, Indonesia tidak memiliki sensor bawah laut. Ia mengatakan, Indonesia memiliki perairan seluas 65 persen dari total luas NKRI. Ole4h karena itu, menurutnya Elita, negara akan rawan bila diserang secara bawah laut. Ancaman bawah laut sangat luar biasa.

"Katanya alasan-alasan lainnya itu sangat mahal. Semahal apapun kalau itu penting, apala-

gi ikut menjaga kedaulatan laut kita, itu wajib Pak," kata Elita kepada KSAL.

Pada bagian lain, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sinergi antarlembaga harus dilakukan untuk menangani masalah keamanan laut karena TNI AL tidak mungkin bisa menjaga seluruh perairan Indonesia.

Ali mengatakan, ego sektoral masih ada di antara lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di laut, namun TNI AL sudah mencoba mengikis pelan-pelan sikap ego sektoral itu dengan menggelar pertemuan-pertemuan di pangkalan TNI AL.

"Memang harus sinergi, jadi kita harus sinergi kalau kita sinergi maka mungkin permasalahan luas laut ini bisa ter-cover," kata Ali.

TNI AL, ujarnya, tidak mungkin bisa menjaga seluruh perairan karena saat ini kondisi sejumlah kapal yang dimiliki usianya sudah tua dan juga adanya pembatasan bahan bakar yang menganggu operasional.

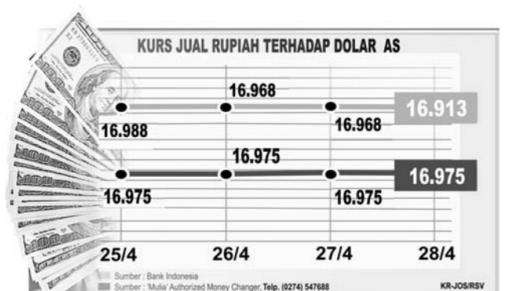
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lanjut KSAL, ada delapan kategori pelanggaran

Wisatawan

Sambungan hal 1

"Life jacket akan disediakan di lokasi. Jadi, ini sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi mereka," ujarnya.

Meski begitu, kata Noviar, Pemda DIY berhati-hati dalam menyusun regulasi ini guna mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya dampak negatif, seperti penurunan jumlah kunjungan wisatawan. "Jadi semuanya kita minta pertimbangan dulu. Lebih baik kita hati-hati dalam melangkah, apakah nanti ada efek negatifnya atau tidak," ujar Noviar. (Ant)-d



Prakiraan Cuaca Selasa, 29 April 2025

| Lokasi | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu C | Kelembaban |
|------------|------|-------|-------|-----------|--------|------------|
| Bantul | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-30 | 65-95 |
| Sieman | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-29 | 65-95 |
| Wates | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-29 | 65-95 |
| Wonosari | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-30 | 65-95 |
| Yogyakarta | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-30 | 65-95 |